

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Integrasi ekonomi negara-negara dalam satu kawasan (regional) atau regionalisme, baik berupa perjanjian perdagangan bebas, persekutuan pabean (*custom union*) ataupun tingkat integrasi yang lebih tinggi, tampaknya telah menjadi cara yang ditempuh oleh tiap negara atau kumpulan negara saat ini sebagai upaya menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Namun gejala atau fenomena regionalisme sebenarnya bukan hal yang baru terjadi saat ini saja, jika kita melihat sejarah, gejala pertumbuhan regionalisme telah dimulai pada abad ke-19. Mansfield dan Miller¹ membagi apa yang disebut sebagai “gelombang” regionalisme menjadi empat gelombang:

Gelombang pertama regionalisme, menurut Mansfield dan Miller, sudah dimulai semenjak paruh kedua abad ke-19, gelombang pertama ini bermula di kawasan Eropa sehingga disebut fenomena Eropa. Persekutuan pabean dan terutama perjanjian perdagangan secara bilateral marak dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa saat itu. Terbentuknya regionalisme Eropa ini dipicu oleh revolusi industri serta kemajuan teknologi di kawasan itu.²

Perang Dunia Pertama, menandai masuknya gelombang regionalisme yang kedua. Periode ini biasa disebut regionalisme antar Perang, yang memiliki ciri tumbuhnya blok-blok perdagangan yang sangat diskriminatif dan protektif hingga diindikasikan mendorong terjadinya Depresi Besar pada tahun 1930-an. Konsentrasi regionalisme antar Perang ini tidak lagi hanya di kawasan Eropa, tetapi sudah mulai masuk ke wilayah Amerika, dengan Amerika Serikat sebagai perndorong regionalisme di kawasan itu.³

Gelombang regionalisme ketiga dimulai pasca Perang Dunia kedua (PD II), yaitu antara tahun 1950-an hingga 1970-an. Berakhirnya PD II, ditandai dengan maraknya dekolonisasi dan nuansa Perang Dingin. Regionalisme pun

¹ Edward D. Mansfield dan Helen V. Miller, “The New Wave of Regionalism,” *International Organization*, Vol. 53, No. 3 (Summer, 1999), 589-627.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

berkembang di kawasan negara-negara berkembang namun dengan tujuan lebih kepada mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara-negara maju, regionalisme didesain sedemikian rupa sehingga menghambat impor dan memacu pertumbuhan industri dalam negeri mereka.⁴

Gelombang regionalisme ke empat datang pada masa pasca Perang Dingin. Pada masa ini, regionalisme, berbeda dengan masa 1950-an hingga 1970-an, didesain sedemikian rupa untuk mendorong ekspor atau berorientasi ekspor dan investasi asing langsung. Interdependensi ekonomi antar negara atau kawasan yang begitu tinggi mewarnai ciri regionalisme periode ini. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun mendorong negara-negara lain untuk turut berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan regional.⁵

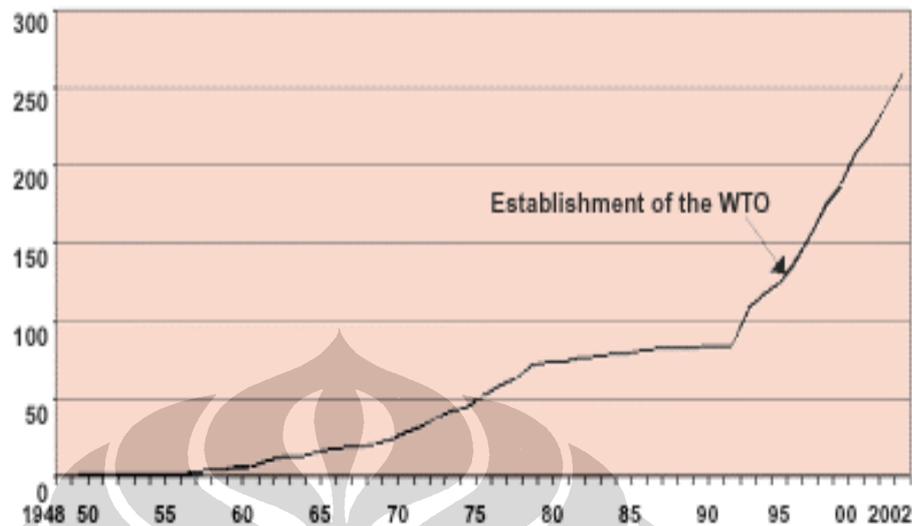
Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa regionalisme bukanlah gejala atau fenomena baru, tetapi dapat dikatakan bahwa perkembangan regionalisme pada masa-masa sekarang ini, atau jika hendak dikategorikan akan masuk dalam regionalisme gelombang ke empat pasca Perang Dingin, jauh melebihi perkembangan fenomena regionalisme pada masa-masa sebelumnya. Jika dilihat dari sisi jumlah saja akan menunjukkan perbedaaan yang cukup jauh, hingga tahun 2007 saja jumlah integrasi ekonomi dan perdagangan secara regional mencapai lebih dari 300 perjanjian. Dengan hampir seluruh negara di dunia ataupun seluruh anggota *World Trade Organization* (WTO) setidaknya bergabung ke dalam satu atau lebih perjanjian perdagangan secara regional, hingga saat ini hanya Mongolia yang tidak bergabung dengan satupun perjanjian perdagangan.⁶ Perkembangan jumlah perjanjian perdagangan regional dapat dilihat dalam Grafik 1.1 di bawah ini:

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Mina Mashayekhi, Lakshmi Puri dan Taisuke Ito, "Multilateralism and Regionalism: The New Interface," bab 1 ("makalah") (Brazil: United Nation Conference on Trade and Development, 8 June 2004), http://www.unctad.org/en/docs/ditctncd20047_en.pdf, (diakses pada 25 Februari 2009 pukul 21.35 WIB).

Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah Perjanjian Perdagangan Regional Tahun 1948-2002



Sumber: Social Science Research Network, “Handbook of International Economic Law” dalam http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=885660&rec=1&srcabs=73688, (diakses pada 12 Januari 2009, pukul 21.30 WIB).

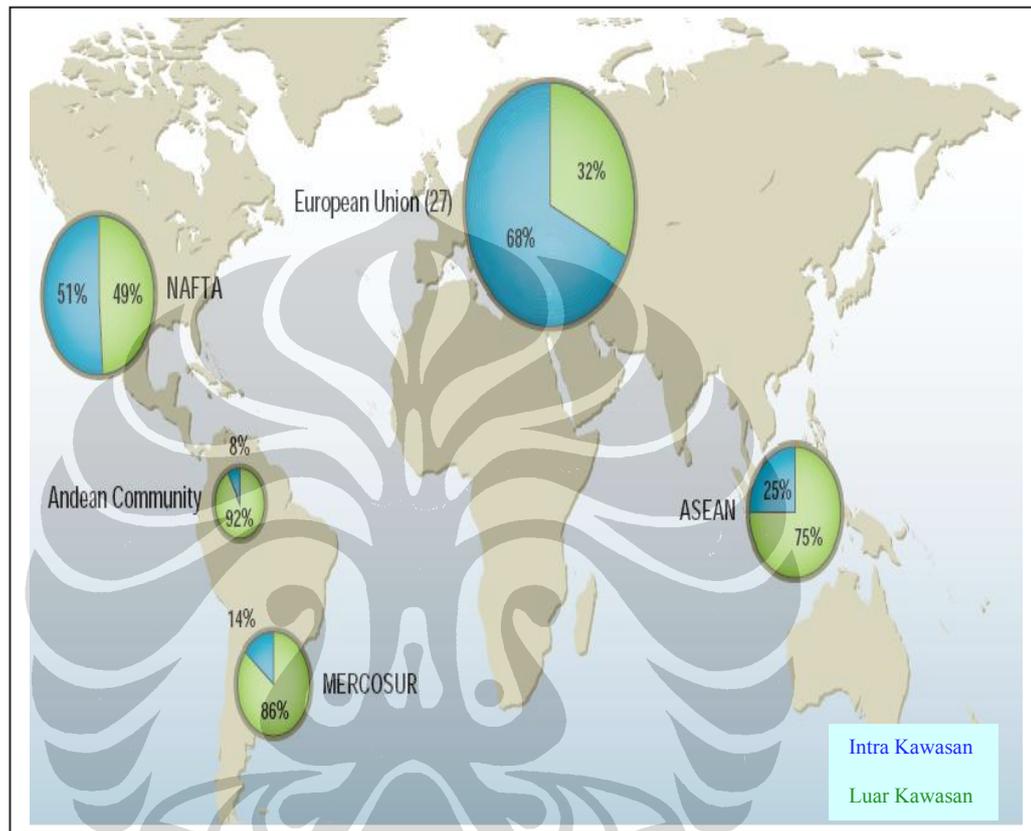
Terlihat dalam Grafik 1.1 di atas peningkatan jumlah perjanjian perdagangan regional yang telah terbentuk meningkat tajam semenjak pasca Perang Dingin awal tahun 1990, dan terus meningkat hingga tahun 2002. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, hingga tahun 2007 jumlah perjanjian itu akan meningkat menjadi 300 perjanjian.

Tercatat berdasarkan data dari WTO bahwa pada tahun 2005, setengah atau 50% perdagangan internasional berasal dari perdagangan intra kawasan integrasi (perjanjian perdagangan bebas dan persekutuan pabean).⁷ Berdasarkan data statistik perdagangan internasional dari lembaga yang sama pula, pada tahun 2007 perdagangan intra kawasan memiliki perbandingan yang cukup signifikan terhadap perdagangan antar kawasan, perdagangan intra kawasan Uni Eropa mencapai dua pertiga atau 68% dari total perdagangan di wilayah itu, *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) mencapai 51%, *Association of South*

⁷ *Ibid.*

East Asian Nations (ASEAN) 25% dan *Southern Common Market* (Mercusur) mencapai 14%, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Perbandingan Perdagangan Intra Kawasan dan Luar Kawasan Tahun 2007



Sumber: World Trade Organization, “World Trade Development Report 2008,” dalam http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its08_world_trade_dev_e.pdf, (diakses pada tanggal 18 Maret 2009, pukul 20.35 WIB).

Perjanjian perdagangan regional atau regionalisme tampaknya memiliki rezim dan arah geografis yang baru, yaitu tidak lagi hanya melingkupi perdagangan barang tetapi juga telah merambah sektor-sektor lain seperti perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, lingkungan, pembangunan dan sebagainya, hingga rezim baru ini biasa disebut sebagai “WTO plus”.⁸ Fenomena yang terjadi saat ini adalah perkembangan perjanjian perdagangan

⁸ Ibid., 4.

antar negara berkembang yang sedemikian pesat, regionalisme memiliki fokus geografis yang baru. Contoh perjanjian perdagangan regional antar negara berkembang adalah seperti Mercusor, NAFTA, *South Asian Free Trade Area* (SAFTA), ASEAN, *Central American Free Trade Area* (CAFTA), *Carribean Community* (CARICOM) dan sebagainya.⁹

Perjanjian perdagangan regional yang terbentuk ternyata sebagian besar berasal dari pembentukan perjanjian perdagangan bebas (*free trade area/FTA*) jika dibandingkan dengan persekutuan pabean atau jenis perjanjian perdagangan regional lainnya.¹⁰ Fenomena ini disebut oleh Jagdish Bhagwati dalam Freund dengan “*spaghetti bowl*”, dunia ini tampak seperti sekumpulan negara yang melakukan perdagangan bebas dengan negara lain dalam satu “mangkok”.¹¹

Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang sedang dalam tahap negosiasi saat ini adalah antara ASEAN dan India. Keduanya memiliki pengalaman masing-masing dalam membentuk FTA dan juga kerjasama ekonomi dengan mitra mereka masing-masing, ada baiknya jika melihat perkembangan pertumbuhan dan kerjasama ekonomi dari ASEAN dan India hingga saat ini.

ASEAN sebagai sebuah entitas pada tahun 1967 dibentuk dengan alasan politik dan keamanan di kawasan. Kerjasama politik merupakan agenda utama ASEAN, sedangkan kerjasama ekonomi hanya menjadi semacam “pelengkap” atau “perekat” kerjasama politik pada masa-masa awal itu.¹² Selain sebagai “pelengkap” persatuan politik (menghindari konflik antarsesama dan komunisme), kerjasama ekonomi ASEAN hingga sebelum tahun 1990-an dapat dikatakan sangat reaktif, skema atau proyek kerjasama ekonomi akan meningkat tatkala ekonomi dunia sedang menurun dan kemudian akan segera menurun saat ekonomi dunia membaik.

Perkembangan integrasi ekonomi dalam tubuh ASEAN memiliki arah dan tenggat waktu yang lebih jelas sejak tahun 1990-an hingga saat ini. Diawali

⁹ *Ibid.*, hlm.16.

¹⁰ Social Science Research Network, *Op. Cit.*

¹¹ Caroline L. Freund, “Spaghetti Regionalism,” (“Makalah”) dalam *International Finance Discussion Papers*, No. 680, (Washington: International Finance Division of the Federal Reserve Board, Federal Reserve System, September 2000), 2.

¹² Narongchai Akrasanee, “ASEAN in The Past Thirty-Three Years: Lessons for Economic Co-operation”, dalam *Reinventing ASEAN*, ed. Simon S.C. Tay, Jesus P.Estanislao and Hadi Soesastro (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), 35.

dengan pembentukan AFTA pada tahun 1992 dan telah berjalan sepenuhnya pada tahun 2003, dan juga skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Kemudian berlanjut pada penancangan ASEAN Vision 2020 pada tahun 1997.¹³ Rencana aksi kerja untuk mendukung Visi itu pun dirancang, seperti *Hanoi Plan of Action* (HPA), *Initiative for ASEAN Integration* (IAI), dan juga *Vientiane Action Programme* (VAP).¹⁴

Upaya akselerasi dan pengejawantahan visi itu pun terus dilakukan salah satunya adalah rencana pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) yang akan selesai pada tahun 2015.¹⁵ AEC merupakan bagian dari *ASEAN Community* (AC) secara keseluruhan yang disahkan melalui Bali Concord II pada Oktober 2003, dua bidang lain yang disepakati untuk dibangun kerjasama dalam AC adalah *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).¹⁶ Berbeda dengan AFTA, AEC akan menjadikan negara-negara ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal (*single market*) dan pusat produksi (*production base*), dengan harapan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah bagian dari rantai produksi global.¹⁷ ASEAN akan menjadi sebuah komunitas bersama yang akan menerapkan kebijakan ekonomi yang sama terhadap negara non-ASEAN. Sebagai salah satu jalan menuju pembentukan AEC, ASEAN haruslah memperkuat perekonomiannya sendiri, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain, sebagaimana tercantum dalam deklarasi Bali Concord II.¹⁸

Tidak hanya integrasi ekonomi di dalam tubuhnya saja yang dilakukan, tetapi ASEAN pun melakukan integrasi ekonomi dengan negara mitra, seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan atau yang biasa disebut dengan ASEAN+3, kemudian juga *East Asia Summit* (EAS) yang terdiri dari ASEAN ditambah dengan enam negara mitra ASEAN, *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Selain itu ASEAN juga intensif melakukan perjanjian bilateral perdagangan bebas

¹³ *Ibid.*

¹⁴ ASEAN Sekretariat, "Cha-am Hua Hin Declaration on The Roadmap for ASEAN Community (2009-2015)," <http://www.aseansec.org/22331.htm>, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2009, pukul 22.30 WIB).

¹⁵ ASEAN Sekretariat, "Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015," <http://www.aseansec.org/19260.htm>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2009, pukul 21.30 WIB).

¹⁶ ASEAN Sekretariat, "Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)," <http://www.aseansec.org/19096.htm>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2009, pukul 22.00 WIB).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dengan berbagai negara seperti: ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (FTA)*, *ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)*, ASEAN-Cina FTA, ASEAN-Korea FTA dan beberapa lainnya.¹⁹

Sedangkan India saat ini telah menjadi salah satu negara terkuat di Asia, berdampingan dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan.²⁰ Melalui liberalisasi ekonomi yang diterapkannya India berusaha mengejar ketertinggalan dari negara-negara besar Asia lainnya. Kebijakan liberalisasi ekonomi mulai dijalankan oleh India sejak akhir 1980 ketika negara itu melakukan kesepakatan dengan IMF, dengan sebutan liberalisme ekonomi selektif karena liberalisme ekonomi ditetapkan pada sektor-sektor tertentu saja.²¹ Sejak awal tahun 1990an, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Narashima Rao muncul kebijakan yang mengejutkan banyak pihak yaitu kebijakan “melihat ke Timur” atau “*Look East Policy*”. Suatu kebijakan yang merubah paradigma kebijakan luar negeri India selama ini, untuk lebih menjalin hubungan yang erat dan terbuka dengan negara-negara tetangganya disebelah Timur, terutama dengan negara-negara Asia Tenggara.²²

Sebagai wujud liberalisasi ekonomi, India pun secara intensif melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan pihak lain, baik secara bilateral maupun multilateral, beberapa di antaranya yaitu: India-Bhutan FTA; *India-Afghanistan Preferential Trading Agreement*; *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)* FTA yang terdiri dari Bangladesh, Bhutan, India sendiri, Myanmar, Nepal, Srilangka dan Thailand; *Asia Pasific Trade Area (APTA)* terdiri dari Bangladesh, Cina, India, Korea Selatan, Laos, dan Sri Langka; India-Nepal (*Indo-Nepal Treaty of Trade*); *FTA between the Republic of India and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka*; *India-*

¹⁹ ASEAN Sekretariat, “Hubungan ASEAN dengan para mitra,”

<http://www.aseansec.org/4918.htm>. (diakses pada 03 Mei 2009 pukul 19.30 WIB).

²⁰ Jakarta Post, “ASEAN-India FTA Signed in Bangkok,”

<http://www.thejakartapost.com/news/2009/08/14/aseanindia-fta-signed-bangkok.html>, (diakses pada 15 September 2009 pukul 20.15 WIB).

²¹ Francis A. Menez, “Implications of Financial Liberalization in India,” (*Swords & Ploughshares: A Journal of International Affairs*),

<http://www1.sis.american.edu/students/sword/spring99/INDIA.PDF> (diakses pada 28 November 2008 pukul 21.45 WIB).

²² John Adams, “India: Much Achieved, much to achieve,” dalam *India and Pakistan: The First Fifty Years*, ed. Selig S. Harrison, Paul H. Kreisberg, and Dennis Kux (Washington: Woodrow Wilson Center Press, 1996), 65.

Mercosur (*Mercusor* terdiri dari Argentina, Paraguay, Uruguay dan Brazil) *Preferential Trade Agreement*; *South Asian Free Trade Area* (SAFTA) yang terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Bhutan, dan Afghanistan; dan beberapa lainnya termasuk ASEAN-India *Regional Trade and Investment Area* (AIRTIA), baik yang masih dalam tahap negosiasi maupun telah ditandatangani.²³ Dari pemaparan ini terlihat bahwa India telah terbiasa membentuk perjanjian perdagangan bebas, baik antar negara (bilateral) maupun dengan suatu kawasan (multilateral), namun patut dicatat bahwa perjanjian perdagangan bebas antara India dan ASEAN (RTIA) merupakan yang pertama India lakukan dengan sebuah kawasan.²⁴

ASEAN dan India, masing-masing telah menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk terbuka terhadap perdagangan bebas. Keduanya (ASEAN dan India) telah menjalin proses integrasi ekonomi yang cukup intensif dengan masing-masing mitra mereka, bahkan diantara kerjasama dan integrasi ekonomi yang mereka lakukan seringkali melibatkan kedua belah pihak, contohnya adalah BIMSTEC FTA, dimana didalamnya terdapat India dan dua negara anggota ASEAN yaitu Myanmar dan Thailand. Sebagaimana diketahui, hubungan antara ASEAN dan India menunjukkan tanda yang positif dari awal hingga saat ini. Hubungan ASEAN-India pasca Perang Dingin, dimulai dari dialog-dialog sektoral di bidang perdagangan, investasi, turisme, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, pada tahun 1992. Kemudian berkembang menjadi dialog kerjasama penuh pada tahun 1995 di Bangkok. India menjadi peserta aktif *Asean Regional Forum* (ARF) semenjak tahun 1996. Hubungan ini berlanjut ke jenjang pertemuan tingkat tinggi atau ASEAN-India *Summit*.²⁵ Batu loncatan awal terpenting dalam hubungan ASEAN-India, khususnya di bidang ekonomi, terjadi pada ASEAN-India *Summit* kedua yang dilaksanakan di Bali 8 Oktober 2003 dimana akhirnya kedua belah

²³ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), "Database Perjanjian Perdagangan Bebas India," http://www.unescap.org/tid/aptiad/agg_db.aspx, (diakses pada 03 Mei 2009 pukul 19.00 WIB).

²⁴ Vibhanshu Shekar, "India's First Multilateral FTA: Lessons Learnt," (Institute of Peace and Conflict Studies), http://www.ipcs.org/India_articles2.jsp?action=showView&kValue=2695&country=1016&status=article&mod=a, (diakses pada tanggal 1 April 2009, pukul 20.30 WIB).

²⁵ ASEAN Sekretariat, "ASEAN-India Dialogue Relations," <http://www.aseansec.org/14803.htm>, (diakses pada tanggal 1 April 2009, pukul 20.30 WIB).

pihak akhirnya sepakat untuk membentuk kerjasama ekonomi yang komprehensif.²⁶

Dengan semua perkembangan yang telah dipaparkan di atas, seharusnya proses kerjasama dan integrasi ekonomi yang mereka lakukan mampu berjalan dengan lancar. Namun kesepakatan (penandatanganan) perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang di antara keduanya tertunda selama enam (6) tahun. Setelah *Framework Agreement* (FA) tersusun pada tahun 2003, ASEAN dan India langsung menyusun *Early Harvest Program* (EHP) dan memulai negosiasi mengenai perdagangan barang. Proses negosiasi kemudian mulai berjalan alot, muncul perselisihan dan serangkaian penundaan-penundaan mewarnai jalannya proses perundingan.

1.2 Permasalahan

Penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang ASEAN-India memakan waktu enam (6) tahun dimulai pada tahun 2003 hingga akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2009. Dalam tahap awal penyusunan tidak tampak permasalahan berarti, namun dalam tahap penyusunan selanjutnya proses perundingan mulai berjalan lamban dan alot.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sehingga pertanyaan penelitian ini adalah apa yang menyebabkan penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang ASEAN-India berjalan lama hingga memakan waktu hingga enam (6) tahun?

1.4 Hubungan antar Variabel

Penelitian ini akan mencoba melihat penyebab lamanya penyusunan kesepakatan dari dua sisi yaitu: pertama, dari sisi proses perundingan penyusunan kesepakatan beserta hambatan-hambatan yang muncul di dalamnya dan; kedua dari sisi domestik masing-masing pihak yang bernegosiasi, untuk melihat sejauh mana faktor domestik berpengaruh terhadap proses negosiasi. Berdasarkan hal itu, maka yang akan menjadi variabel bebas (independen) atau unit eksplanasi dalam

²⁶ ASEAN Sekretariat, "ASEAN-India," <http://www.aseansec.org/4971.htm>, (diakses pada tanggal 5 April 2009, pukul 19.30 WIB).

penelitian ini adalah pertama, proses perundingan perdagangan bebas beserta hambatan-hambatan yang muncul di dalamnya dan kedua, faktor domestik pihak-pihak yang bersepakat yaitu ASEAN dan India. Sedangkan lamanya penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang ASEAN-India akan menjadi unit analisa atau variabel terikat (*dependen*).

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai ASEAN dan perkembangan integrasi ekonominya serta interaksi grup itu dengan negara diluar ASEAN terutama dengan India, merupakan kajian yang sangat menarik dan penting untuk didalami karena bagaimanapun juga hubungan ASEAN-India akan memiliki dampak terhadap Indonesia. Beragam tulisan membahas hubungan antara ASEAN dan India dari berbagai macam sudut pandang dan fokus pembahasan, di bawah ini adalah tiga tinjauan pustaka yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini.

Pertama, tinjauan pustaka terhadap tulisan Suparna Karmakar yang berjudul *India-Asean Cooperation in Services – an overview*, working paper No.176 tahun 2005. Dijelaskan oleh Karmakar bahwa ekonomi dunia saat ini telah berubah dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang digerakkan oleh sektor jasa.²⁷ Revolusi di sektor jasa, yang dimulai pada awal tahun 1990-an, menurutnya telah merubah cara kita melakukan bisnis atau perdagangan di seluruh dunia. Sebelum tahun 1990-an, pergerakan ekonomi di dunia masih didominasi oleh pertumbuhan dan perdagangan di sektor manufaktur atau barang, namun data pada tahun 1990 – 2000-an menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan dan perdagangan di sektor jasa telah melampaui nilai pertumbuhan dan perdagangan di sektor manufaktur.²⁸ Kemajuan teknologi di bidang informasi, transportasi dan komunikasi yang diikuti oleh meningkatnya integrasi pasar keuangan telah mendorong revolusi di sektor jasa serta kemampuannya untuk diperdagangkan.²⁹ Diperkirakan oleh Karmakar, wilayah Asia-Pasifik merupakan salah satu wilayah yang akan memperoleh keuntungan terbesar dari revolusi jasa

²⁷ Suparna Karmakar, "India-Asean Cooperation in Services – An Overview," *Working Paper* No. 176 (New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations, 2005),1.

²⁸ *Ibid.*, 1 - 2.

²⁹ *Ibid.*

dan perdagangannya. Namun di tengah semua keuntungan yang mampu didapatkan itu, menurut Karmakar perdagangan ASEAN-India di bidang jasa masih sangat rendah jika dibandingkan dengan perdagangan di bidang barang, perdagangan keduanya masih didominasi oleh perdagangan barang. Sedemikian banyak potensi kerjasama di sektor jasa yang masih belum digali secara maksimal oleh ASEAN dan India. Karmakar memaparkan di bidang-bidang mana sajakah dalam sektor jasa yang potensial dikembangkan oleh ASEAN dan India, serta poin-poin penting yang mampu meningkatkan kerjasama keduanya di sektor itu.³⁰

Tinjauan pustaka yang kedua dilakukan terhadap tulisan Rahul Sen dan kawan. Tulisan dengan judul: *ASEAN-India Economic Relations: Current Status and Future Prospects*, memaparkan secara jelas dan lengkap mengenai perkembangan hubungan dan kerjasama ekonomi ASEAN dan India di sektor perdagangan barang, jasa, investasi, pariwisata dan sebagainya.³¹ Namun tulisan ini dianalisis dari sudut pandang India. Sen, menjelaskan bahwa hubungan ASEAN dan India baik dari sisi ekonomi dan politik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meningkatnya nilai perdagangan kedua belah pihak dan keterlibatan India dalam forum kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitranya merupakan bukti peningkatan hubungan di antara keduanya.³² Diluar berbagai hal positif yang diungkapkan tersebut, Sen menjelaskan bahwa ASEAN dan India jangan menganggap remeh tantangan-tantangan yang mungkin muncul di depan ataupun yang telah menjadi batu sandungan dalam hubungan keduanya saat ini. Tantangan-tantangan itu antara lain adalah, pertama, perbedaan sektor unggulan di bidang perdagangan di antara keduanya, ASEAN memiliki keunggulan di sektor perdagangan barang sedangkan India unggul di sektor perdagangan jasa, hal inilah yang harus dapat diselaraskan di kemudian hari, menurut Sen. Tantangan yang kedua menurut Sen adalah kurang tertariknya beberapa pihak di ASEAN untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan India.³³ Tampaknya India harus lebih mampu meyakinkan pihak-pihak tertentu di ASEAN bahwa menjalin hubungan yang lebih erat dengan India merupakan hal

³⁰ *Ibid.*, hlm. 14 - 21.

³¹ Rahul Sen, Mukul G.Asher, dan Ramkishen S.Rajan, "ASEAN-India Economic Relations: Current Status and Future Prospects," *Economic & Political Weekly* 39 (2004), 3297 - 3308.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

yang penting dan menguntungkan. Sen diakhir tulisannya memaparkan data mengenai beberapa sektor yang sangat potensial bagi peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dan India, sektor-sektor tersebut bervariasi mulai dari sektor pangan dan pertanian, energi dan sumber daya alam, hingga kerjasama di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan bidang unggulan India.³⁴

Karya tulis Shankari Sundararaman yang berjudul: *Politics and Security in South-East Asia: Prospects for India-ASEAN Cooperation*, akan menjadi tinjauan pustaka yang keempat. Dalam tulisan ini Sundararaman mencoba melihat isu-isu keamanan dan politik yang muncul di wilayah Asia Tenggara, serta bagaimana sebaiknya India bersikap dan mengambil kebijakan terhadap perkembangan yang terjadi di wilayah itu.³⁵ Dijelaskan dalam tulisan ini mengenai tantangan-tantangan dalam perkembangan sektor keamanan di wilayah ASEAN, mulai dari awal pembentukan ASEAN hingga pasca serangan 11 September 2001. Tantangan-tantangan itu menurut Sundararaman adalah globalisasi, pertumbuhan militer dan kondisi politik di masing-masing negara, dan perang melawan terorisme yang dilakukan oleh AS. Tantangan-tantangan dari sisi keamanan itu telah memengaruhi proses integrasi dalam tubuh ASEAN sendiri maupun kerjasama dengan pihak luar ASEAN. Kerjasama ASEAN dan India dalam ARF, atau *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), dan juga dalam *Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone* (SEANWFZ) merupakan beberapa contoh diantara kerjasama kedua belah pihak dalam sektor keamanan. Kerjasama asean dan india di bidang ekonomi seperti BIMSTEC dan ASEAN-India RTIA pun tidak lepas dari pengaruh pertimbangan-pertimbangan dalam sektor keamanan.³⁶

Perbandingan ketiga penelitian atau tulisan di atas secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 1.1 di bawah ini:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Shankari Sundararaman, "Politics and Security in Southeast Asia: Prospects for India-ASEAN Cooperation." *International Studies*, Volume 41 (4) (2004): 371-385.

³⁶ *Ibid.*

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian	Kasus	Periode	Pendekatan
Suparna Karmakar, <i>India-Asean Cooperation in Services – an overview</i> (New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations, 2005), Working Paper No.176.	Secara spesifik dan lengkap memaparkan perkembangan hubungan perdagangan ASEAN-India di sektor jasa. Terdiri dari data-data kualitatif dan kuantitatif. Dipaparkan bahwa hubungan di antara keduanya disektor jasa masih sangatlah rendah dan masih banyak hal perlu dan dapat ditingkatkan.	1995-2005	Kualitatif
Rahul Sen, Mukul G.Asher, dan Ramkishan S.Rajan, "ASEAN-India Economic Relations: Current Status and Future Prospects," <i>Economic & Political Weekly</i> 39 (2004): 3297-3308.	Melihat perkembangan hubungan ASEAN-India, khususnya di bidang ekonomi. Membahas secara singkat hubungan ekonomi keduanya di sektor perdagangan barang, jasa, investasi, pariwisata dan arus manusia. Hubungan itu dilihat dari sudut pandang India. Dengan menekankan apa yang dapat dilakukan India dengan kondisi kontemporer yang ada. Dipaparkan mengenai sektor-sektor kerjasama ekonomi yang potensial bagi kedua belah pihak.	1990an-2000 awal.	Kualitatif
Shankari Sundararaman yang berjudul: <i>Politics and Security in South-East Asia: Prospects for India-ASEAN Cooperation</i> , International Studies 2004 vol.41.	Melihat isu-isu politik dan keamanan di wilayah Asia Tenggara dan kebijakan yang diambil India terhadap kondisi itu dalam rangka mempererat hubungannya dengan ASEAN.	1997-2004	Kualitatif

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian atau tulisan-tulisan di atas, karena, perbedaan dari sisi subjek dan analisa. Artikel pertama membahas mengenai hubungan ASEAN-India dari sisi perdagangan jasa, sedangkan artikel kedua memaparkan perkembangan hubungan perdagangan ASEAN-India dilihat dari sisi India, apa yang dapat dilakukan India dengan kondisi yang ada. Dan artikel ketiga mencoba menjelaskan mengenai kondisi politik dan keamanan di wilayah Asia Tenggara dan pengaruh kondisi itu terhadap hubungan ASEAN dan India. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terutama terkait dengan proses penyelesaian perselisihan dan pencapaian kesepakatan dalam negosiasi pembentukan FTA di bidang perdagangan barang antara ASEAN dan India.

1.6 Kerangka teori

1.6.1 Integrasi Ekonomi

Hubungan perdagangan yang semakin erat antar negara yang satu dengan yang lain, mampu menyebabkan kesalingtergantungan antar negara yang menjalin hubungan itu semakin tinggi. Ataupun juga ketika dua atau lebih negara ingin semakin mempererat hubungan perdagangan ataupun ekonomi di antara mereka maka dilakukanlah integrasi ekonomi. Kedua alasan itu dapat dikatakan sebagai pendorong dari dilakukannya perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan India. Ketika hubungan perdagangan di antara keduanya terus melonjak dari tahun ke tahun dan terdapat keinginan untuk semakin mempererat hubungan itu, maka dilakukanlah kesepakatan yang akan semakin mengintegrasikan ekonomi keduanya dengan cara mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang ada selama ini.

Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Salvatore,³⁷ menurutnya integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Kesepakatan penurunan atau

³⁷ Dominick Salvatore, *International Economics* (New Jersey: Prentice Hall- Gale, 1997), 321.

penghapusan hambatan perdagangan hanya akan berlaku bagi negara-negara yang saling bersepakat, dan tidak berlaku atau diterapkan bagi negara-negara di luar itu.

Ditambahkan oleh Balassa dalam Wang,³⁸ dia mengartikan integrasi ekonomi sebagai sebuah proses dan rancangan terukur yang merepresentasikan hilangnya segala bentuk diskriminasi ekonomi antar negara. Menurut Balassa, integrasi ekonomi yang pasti adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara-negara bukan aktor atau unit lain. Balassa pun secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara itu. Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya.

Tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi itu dijelaskan oleh Balassa dan Salvatore, mereka berpendapat bahwa integrasi ekonomi dilakukan secara berurutan dari yang sangat longgar hingga yang paling dalam. *Pertama*, adalah area perdagangan bebas, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya, namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri dalam tarif terhadap negara-negara non anggota.³⁹ Jika area perdagangan bebas menjadi integrasi ekonomi yang paling longgar atau yang pertama dalam pandangan Balassa, maka menurut Salvatore integrasi ekonomi yang paling longgar adalah pengaturan perdagangan preferensial atau *preferential trade arrangements* dan area perdagangan bebas menjadi tahap yang kedua. Pengaturan perdagangan bebas menurut Salvatore adalah menurunkan (tidak menghilangkan) hambatan

³⁸ Jiangyu Wang, "China, India and Regional Economic Integration in Asia: The Policy and Legal Dimensions," ("makalah") in Singapore Year Book of International Law (National University of Singapore, June 2006),

http://www.icrier.org/pdf/28march/28March07Afternoonday1/Wang_v1_rev30Nov06-pdf.pdf (diakses pada 23 Maret 2009, pukul 19.35 WIB).

³⁹ *Ibid.*

perdagangan antara negara yang bersepakat, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.⁴⁰

Kedua, persekutuan pabean atau *customs union*, penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat (layaknya area perdagangan bebas), ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan, seperti tarif, dengan negara non anggota, hal ini biasa disebut dengan *common external tariffs*; *Ketiga*, tingkatan ekonomi yang lebih tinggi berikutnya adalah pasar bersama atau *common market*. Menurut Balassa dan Salvatore dalam pasar bersama ini, yang dihilangkan atau ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang, dan modal.⁴¹

Selain itu saat ini, menurut Wang, berkembang apa yang disebut dengan pasar tunggal atau *single market*, menurutnya pasar tunggal memiliki tingkat integrasi yang sedikit lebih tinggi daripada pasar bersama, mengutip Peter Lloyd, pasar tunggal adalah prinsip atau hukum satu harga dalam barang, jasa, dan juga faktor-faktor pasar dalam suatu wilayah, sehingga dalam pasar tunggal dilakukanlah penyeragaman peraturan dan prosedur antara negara-negara anggota kesepakatan;⁴² *Keempat*, tingkat ekonomi yang paling tinggi, menurut Balassa dan Salvatore adalah persatuan atau uni ekonomi (*economic union*). Dalam persatuan ekonomi, selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor-faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Penyeragaman itu akan terjadi di bidang moneter, fiskal, finansial, dan juga penanggulangan permasalahan terkait ekonomi lainnya.⁴³

Integrasi ekonomi dapat dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah ataupun tidak, beberapa ahli berpendapat integrasi ekonomi sama dengan regionalisme karena mereka tidak membedakan apakah integrasi itu terjadi dalam satu wilayah atau tidak ataupun juga bahwa regionalisme itu haruslah dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah. Namun mengacu kepada pengertian

⁴⁰ Dominick Salvatore, *Op. Cit.*, 321.

⁴¹ Jianguy Wang, *Op. Cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

regionalisme yang diberikan oleh WTO, yaitu bahwa regionalisme adalah tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk melakukan liberalisasi atau memfasilitasi perdagangan dalam lingkup regional,⁴⁴ maka dapat disimpulkan bahwa regionalisme adalah integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam wilayah yang sama atau negara-negara itu berdekatan letaknya.

Integrasi ekonomi secara regional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan, atau yang biasa disebut dengan perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA) ataupun perjanjian perdagangan regional atau *regional trade agreement* (RTA). Kedua istilah ini sering dipakai bergantian karena dalam pandangan WTO pun, RTA tidak hanya sebatas perjanjian perdagangan bebas negara-negara dalam satu wilayah.⁴⁵

1.6.2 Proses Negosiasi

Integrasi ekonomi melalui pembentukan perjanjian perdagangan bebas, tentunya melalui tahap-tahapan tertentu salah satunya yaitu tahap negosiasi dalam penyusunan perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Negosiasi adalah suatu tahap dimana pihak-pihak yang bersangkutan saling mengajukan tuntutan dan keinginan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Odell bahwa negosiasi adalah:⁴⁶

“a sequence of actions in which two or more parties address demands and proposals to each other for the ostensible purposes of reaching an agreement and changing the behavior of at least one actor. (Suatu kegiatan pengajuan tuntutan-tuntutan dan penawaran-penawaran antara dua pihak atau lebih secara bertahap dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dan untuk merubah sikap salah satu pihak).”

Negosiasi merupakan hal yang rumit⁴⁷ dan memiliki beragam strategi. Namun menurut Odell, dari sekian banyak strategi negosiasi, terdapat tiga strategi

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ John S. Odell, “The Negotiation Process and International Economic Organizations,” (“makalah”) dipersiapkan untuk Annual Meeting of the American Political Science Association (School of International Relations, University of Southern California, September 1999), www-rcf.usc.edu/~odell/APSA99.DOC (diakses pada 20 Desember 2009, pukul 20.35 WIB).

⁴⁷ Larry Crump, “Concurrently Linked Negotiations and Negotiation Theory: An Examination of Bilateral Trade Negotiations in Australia, Singapore and the United States,” (“makalah”) dalam

utama dalam negosiasi yaitu *distributive strategy*, *integrative strategy*, dan *mix strategy*.⁴⁸

Distributive strategy merupakan suatu strategi yang digunakan oleh salah satu pihak ketika pihak tersebut merasa hasil negosiasi tidak akan menguntungkan pihaknya maupun pihak lawan atau menemui jalan buntu. Pihak yang menggunakan strategi ini akan selalu mengedepankan keuntungan atau kemenangan dari sisinya atau paling tidak pihaknya tidak mengalami kerugian. Taktik utama strategi ini yaitu mengajukan penawaran yang tinggi, bersifat tertutup, lamban dalam bernegosiasi (tidak cepat atau gampang menerima penawaran pihak lawan), menunda-nunda proses negosiasi dan beberapa taktik lainnya.⁴⁹

Sedangkan *integrative strategy*, adalah strategi yang mengedepankan tercapainya hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Taktik dari pihak yang menggunakan strategi ini yaitu menawarkan penyusunan suatu perjanjian yang saling menguntungkan, selalu berusaha mencari solusi alternatif di luar penawaran yang telah diajukan oleh pihak lawan maupun pihaknya dan beberapa hal lainnya.⁵⁰

Selanjutnya yaitu *mix strategy*, strategi ini menurut Odell adalah strategi yang lebih sering digunakan dalam proses-proses negosiasi. Strategi ini merupakan gabungan dari strategi *distributive* dan *integrative*, pihak yang menggunakan taktik ini berkomitmen untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi pihaknya maupun lawan, tetapi ada kecenderungan untuk tidak terlalu terbuka terhadap pihak lawan dan selalu berusaha membawa negosiasi ke arah yang lebih menguntungkan bagi pihaknya. Strategi ini dapat lebih cenderung ke arah *distributive* ataupun *integrative*, begitu pun alurnya dapat dimulai (awal negosiasi) dari menggunakan strategi *integrative* dan berubah menjadi *distributive* di akhir negosiasi.⁵¹

The Occasional Paper series on Conflict Analysis and Resolution (Conflict Analysis and Resolution program of Sabanci University, June 2005),
http://www.sabanciuniv.edu.tr/ssbf/conf/eng/docs/occ_paper/concurrently_linked_negotiationsand_negotiation_theory.pdf (diakses pada 20 Desember 2009, pukul 22.00 WIB).

⁴⁸ John S. Odell, Op.Cit.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

1.6.3 Keterbukaan dan Ketertutupan (Proteksionis) Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri suatu Negara atau Kawasan

Kebijakan perdagangan luar negeri suatu negara yang terbuka (dengan melakukan integrasi ekonomi dan perdagangan bebas) ataupun tertutup dipengaruhi oleh beragam faktor atau alasan. Faktor itu berasal dari dalam diri (internal) negara atau kawasan itu dan dapat pula berasal dari luar (eksternal) negara atau kawasan itu.

Faktor yang berasal dari dalam diri negara atau kawasan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Milner dan Yoffie melihat kebijakan perdagangan luar negeri yang terbuka ataupun tertutup dari sudut pandang pengaruh (lobi) korporasi terhadap kebijakan perdagangan negara, jika korporasi domestik negara itu berorientasi pada pasar domestik bukan ekspor, maka korporasi itu akan menuntut perlindungan atau kebijakan proteksionis dari negara. Sedangkan jika korporasi itu berorientasi ekspor, dan memiliki jaringan atau anak perusahaan di luar negeri maka korporasi itu akan menuntut diberlakukannya perdagangan bebas atau membuka perdagangan luar negeri kepada negara. Kondisi korporasi di suatu negara akan memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri negara itu.⁵²
- b. Menurut pandangan merkantilis, sebagian besar negara akan cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan menghindari ketergantungan dari negara lain, jika menyangkut komoditas-komoditas dasar seperti bahan pangan dan sumber daya alam sebagai wujud dari ketahanan nasional. Oleh karenanya dalam perdagangan internasional jika menyangkut mengenai kebutuhan pangan (sektor pertanian) dan bahan-bahan mentah kebutuhan industri terjadilah kebijakan-kebijakan proteksionis bahkan dari negara maju sekalipun. Hal itu dikarenakan pula lobi pihak-pihak berkepentingan dari sektor-sektor ekonomi yang rentan

⁵² Helen V. Milner and David B. Yoffie, "Between Free Trade and Protectionism: Strategic Trade Policy and a Theory of Corporate Trade Demands," *International Organization*, Vol. 43, No. 2 (Spring, 1989): 239 – 272.

terhadap perdagangan bebas, seperti sektor pertanian, sangatlah kuat di negara-negara maju seperti AS dan Jepang.⁵³

c. Sedangkan menurut Lentner, faktor internal yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara adalah sistem politik serta rezim yang berkuasa di negara itu. Sistem politik yang berjalan di suatu negara apakah presidensial, parlementer, otoriter ataupun demokratis memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.⁵⁴ Sebagai contoh, dalam sistem politik yang demokratis, untuk tetap mempertahankan posisinya atau kekuasaannya elite politik haruslah berusaha untuk memenuhi keinginan konstituen atau pengikutnya, jika ia ingin dipilih kembali dalam pemilihan umum berikutnya.⁵⁵ Dan selanjutnya menurut Lentner, pergantian pucuk pimpinan (negara atau pemerintahan) akan pula membawa perubahan kebijakan luar negeri di negara itu, karena pimpinan yang baru akan membawa serta tujuan baru, harapan baru, pengikut-pengikut baru dan sebagainya.⁵⁶ Kondisi politik dan pemerintahan suatu negara tampaknya sangat memengaruhi kebijakan luar negeri negara itu termasuk untuk menerapkan kebijakan perdagangan luar negeri yang terbuka atau tertutup. Sedangkan faktor yang berasal dari luar negara atau kawasan antara lain adalah sebagai berikut:

- Khususnya bagi negara-negara berkembang, kegagalan putaran WTO untuk mengangkat kepentingan kelompok itu, Menurut Odell dalam Jerome Prieur dan Omar R. Serrano, menyebabkan mereka saling membuka diri (integrasi ekonomi dan perdagangan bebas antar mereka) untuk membangun koalisi yang kuat saat melaksanakan perundingan di WTO.⁵⁷ Negara-negara berkembang tampaknya merasa perlu menyatukan

⁵³ David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1996), 107.

⁵⁴ Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach* (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1974), 160 - 161.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.191

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.192

⁵⁷ Jerome Prieur dan Omar R. Serrano, "Coalitions of Developing Countries in the WTO: Why Regionalism Matters?" (The Graduate Institute of International and Development Studies Geneva) <http://hei.unige.ch/sections/sp/agenda/wto/wto2006/Developing%20Countries%20Coalitions%20in%20the%20WTO%20vrai.pdf> (diakses pada 21 November 2008 pukul 16.05 WIB).

kekuatan dalam menghadapi negara-negara maju dalam perundingan perdagangan multilateral seperti halnya dalam putaran WTO.

- Menurut Baldwin dan Yi dalam Freund, saat perjanjian perdagangan bebas dilakukan oleh begitu banyak negara, maka negara-negara yang tidak ikut serta di dalamnya yang akan menanggung kerugian atau menurut bahasa Freund biaya yang ditanggung suatu negara dengan tidak bergabung dalam perjanjian bebas akan lebih besar dibandingkan dengan biaya jika negara itu bergabung (dalam perjanjian perdagangan bebas).⁵⁸ Sehingga setiap negara ingin melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Dalam hal ini, selain unsur “penularan” terlihat pula unsur reciprocity dalam pengambilan keputusan membuka perdagangan luar negeri. *Reciprocity*, yaitu respon suatu negara terhadap negara lain, jika negara lain bersikap terbuka maka negara itu pun akan bersikap terbuka. Begitu pula sebaliknya, jika negara lain tertutup maka negara itu akan tertutup.⁵⁹
- Menurut Andreas Waldkirch dalam artikelnya yang berjudul *The “New Regionalism” : Integration as a Commitment Device for Developing Countries*, perjanjian perdagangan bebas digunakan oleh berbagai negara, terutama negara-negara berkembang untuk menarik investasi asing langsung.⁶⁰ Peran penting investasi asing langsung dalam memotivasi pembentukan perdagangan bebas datang dari Mohamed Ariff,⁶¹ dia menyatakan bahwa karena penurunan tarif barang terjadi dimana-dimana, maka perjanjian perdagangan bebas sekarang ini tidak hanya mengarah pada penurunan tarif atau liberalisasi perdagangan barang tetapi juga liberalisasi perdagangan jasa dan arus investasi.

⁵⁸ Caroline, *Op. Cit.*, 3.

⁵⁹ Helen, *Op. Cit.*

⁶⁰ Andreas Waldkirch, “The ‘New Regionalism’: Integration as a Commitment Device for Developing Countries,” (Social Science Research Network, September 2004), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=470163 (diakses pada 25 November 2008 pukul 21.35 WIB), 2-3.

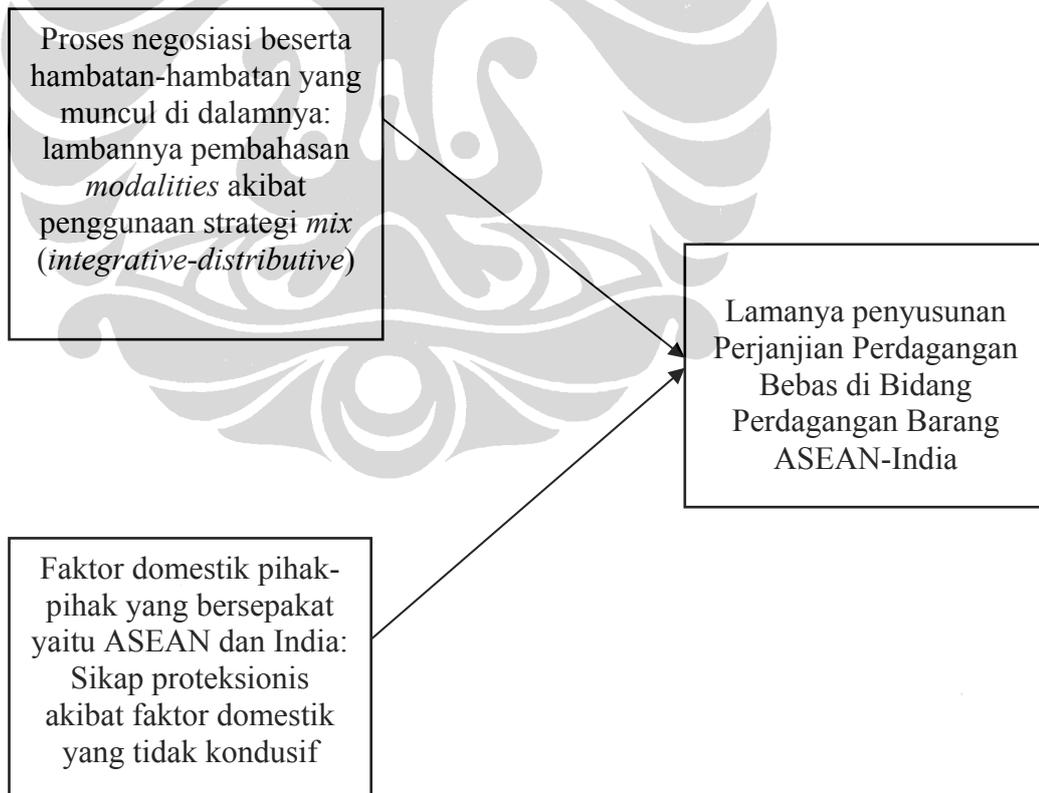
⁶¹ Mohamed Ariff, “Trade, Investment, and Interdependence,” dalam *Reinventing ASEAN*, ed. Simon S.C. Tay, Jesus P. Estanislao and Hadi Soesastro (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), 60.

- Sedangkan menurut Gilpin,⁶² motivasi pembentukan perjanjian perdagangan bebas yaitu: mulai bermunculannya kekuatan-kekuatan ekonomi baru, persaingan ekonomi yang semakin ketat, dan perkembangan teknologi yang sedemikian cepatnya.

1.7 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah lamanya penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang ASEAN-India dipengaruhi oleh lamban dan alotnya proses negosiasi terutama dalam pembahasan *modalities* perdagangan barang akibat penggunaan strategi *mix* (dari *integrative-* ke *distributive*) serta dipengaruhi pula oleh faktor domestik yang tidak kondusif dari salah satu pihak.

1.8 Operasionalisasi Konsep



⁶² Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order* (New Jersey: Princeton University Press, 2001), 345.

1.9 Metodologi Penelitian

Menurut Sprinz dan Wolinsky-Nahmias terdapat tiga metode penelitian dalam studi Hubungan Internasional, yaitu: studi kasus, kuantitatif, dan formal model.⁶³ Untuk mempersingkat hanya akan dibahas mengenai studi kasus. Berdasarkan pendapat Bennet studi kasus adalah analisis suatu kasus atau unit tertentu secara historis yang dipilih oleh peneliti.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian ini lebih sesuai menggunakan metode penelitian studi kasus, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *literature review* dan wawancara dengan para narasumber baik yang terlibat langsung dalam perundingan maupun tidak. Dalam literatur review yang dilakukan dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan adalah data-data kualitatif yaitu data-data primer yang didapatkan dari dokumen internal Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, laman resmi sekretariat ASEAN dan laman Kementerian Perdagangan Malaysia. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berasal dari jurnal, artikel, maupun buku.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian kali ini akan terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, hubungan antar variabel, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, operasionalisasi konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Kelayakan Integrasi Ekonomi ASEAN dan India. Dalam bab ini akan dipaparkan secara statistik kondisi perdagangan luar negeri dan makro-ekonomi India, ASEAN dan hubungan ekonomi antara keduanya untuk melihat kelayakan integrasi ekonomi ASEAN dan India.

Bab III, Penyusunan Perjanjian. Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan

⁶³ Sprinz, F. Detlef dan Yael Wolinsky-Nahmias, *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations* (USA: The University of Michigan Press, 2004), 2.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

Barang ASEAN-India, serta kondisi dari masing-masing pihak dalam tiap tahap pencapaian kesepakatan.

Bab IV, Kesimpulan. Dalam bab terakhir ini, akan berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian beserta pembuktian hipotesis.

